

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Pemerintah daerah merupakan lembaga yang diberikan wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan dan mengatur sendiri kepentingan bangsa dan negara di daerah. Lembaga Pemerintah Daerah mempunyai tujuan untuk melakukan pembangunan-pembangunan untuk kepentingan masyarakat umum dengan mengadakan program Otonom Daerah. Hal ini bertujuan untuk memajukan setiap daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Menurut UU No 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri seluruh pemerintahan dan pembangunan di daerah yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini untuk mengelola anggaran keuangannya maka sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sangat diharapkan oleh banyak pihak yaitu sistem pembagian keuangan yang adil, demokratis, transparan dan efisien maka tentunya memberikan semangat bagi seluruh warga Negara dan Pemerintah Daerah khususnya untuk memberdayakan sumber daya ekonomi yang baik secara mandiri, ekonomis, efisien, dan efektif.

Melihat dari segi pelaksanaan otonomi daerah tentunya hal tersebut memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan memanfaatkan potensi daerah yang ada. Maka, Pemerintah Daerah Provinsi diberi hak otonomi untuk merencanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing tiap provinsi maupun kabupaten serta berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan seluruh sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diberi kebebasan menentukan prioritas pembangunan daerah selama tetap memperhatikan keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.

Analisis kinerja keuangan pada anggaran pendapatan belanja daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Kota Kupang sekaligus sebagai Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah otonom yang diberikan kewenangan untuk

mengatur dan mengurus otonom serta dituntut kemandiriannya dalam semua bidang terutama dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah.

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui menjadi pengurang nilai kekayaan bersih selama periode anggaran bersangkutan. Belanja daerah sendiri diklasifikasikan menjadi tiga yaitu klasifikasi fungsi, organisasi dan ekonomi (Halim & Kusufi, 2012). Klasifikasi ekonomi biasa digunakan dalam LRA yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang diterima kembali baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jl. EL Tari Nomor 52 Kupang merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas antara lain yaitu pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Tabel berikut ini menggambarkan data-data angka yang diperoleh dari laporan keuangan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT periode 2019-2022.

Berikut informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Sebagai berikut :

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2019-2022

Uraian	APBD tahun 2019 (Rp)		APBD tahun 2020 (Rp)		APBD tahun 2021 (Rp)		APBD tahun 2022 (Rp)	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	5.561.056.352.548	5.354.092.405.679,30	5.837.951.035.522	5.419.935.156.637,49	5.881.616.887.272	5.312.446.872.608,51	5.025.424.352.991,00	4.426.473.562.255,23
Pendapatan Asli Daerah	1.345.841.709.148	1.258.958.953.288,30	1.465.773.875.091	1.166.570.596.936,49	1.672.063.318.672	1.238.032.648.888,51	1.908.984.931.665,00	1.363.737.981.851,23
Dana Transfer	4.174.054.978.000	4.067.952.844.498	4.254.275.336.867	4.152.039.227.723,00	4.124.996.231.200	4.000.655.446.445	3.110.242.996.000,00	3.053.836.755.861,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	41.159.665.400	27.180.607.893,00	117.901.827.564	101.325.331.978,00	84.557.337.400	73.758.777.275	6.196.425.326,00	8.898.824.543,00
Belanja Daerah	5.769.807.564.376,55	5.277.064.650.987,30	6.346.051.009.714	5.755.258.016.193,64	6.880.672.335.906	5.508.767.906.132,69	5.497.911.918.082,00	4.816.652.654.356,79
Belanja Operasi	3.426.162.562.462	3.272.862.480.882,54	3.826.954.583.635	3.489.052.056.653,39	153.507.896.803	135.775.036.685	3.455.350.145.016,00	3.051.851.164.202,45
Belanja Modal	2.343.645.001.914,55	2.004.202.170.104,76	2.519.096.426.079	2.266.205.959.540,25	1.857.834.104.917	903.257.622.800	1.337.288.801.433,00	1.216.802.446.597,34
Belanja Tak Terduga	12.700.000.000	1.490.608.760	282.577.430.725	240.938.915.874	153.507.896.803	135.775.036.685	31.577.104.119,00	7.228.173.756,00
Surplus/Defisit	(208.751.211.828,55)	77.027.754.692	(508.099.974.192)	(335.322.859.556,15)	(999.055.448.634,00)	(196.321.033.524,18)	(472.487.565.091,00)	(390.179.092.101,56)
Pembiayaan Daerah	230.351.211.828,55	227.099.937.249,55	562.099.974.192,00	457.706.217.940,55	999.055.448.634,00	258.865.991.150,79	472.487.565.091,00	473.213.790.906,71
Pembiayaan Netto	208.751.211.828,55	205.602.009.249,55	508.099.974.192,00	403.706.217.940,55	999.055.448.634,00	258.865.991.150,79	472.487.565.091,00	473.213.790.906,71
SiLPA	-	282.629.763.941,55	-	68.383.358.384,40	-	62.544.957.626,61	-	83.034.698.805,15

Pada Tabel di atas, menunjukkan bahwa realisasi APBD Provinsi NTT mengalami penurunan berturut-turut dari tahun 2019-2022, pada tahun 2019 realisasinya sebesar Rp 5.354.092.405.679,30 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 5.419.935.156.637,49 dan pada tahun 2021 realisasinya sebesar Rp 5.312.446.872.608,51 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 4.426.473.562.255,23 kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum maksimal dalam menggali potensi sumber pendapatan daerah sehingga menyebabkan pemerintah daerah masih sangat membutuhkan bantuan dari pihak luar. Terlihat dari total dana perimbangan lebih tinggi dari pendapatan asli daerah.

Realisasi PAD yang rendah disebabkan karena menurunnya penerimaan dari pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah akibat dampak dari pandemi Covid-19 (CNNEWS,2021). Pendapatan pajak mengalami penurunan akibat masih banyak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKMB). Hal ini disampaikan oleh Alex Lumba sebagai Kepala Badan Aset dan Pendapatan Nusa Tenggara Timur (Jehola,2021).

Pada tabel di atas juga menunjukkan realisasi Belanja Provinsi NTT juga terbilang rendah dari tahun 2019-2022. pada tahun 2019 realisasi belanja daerah sebesar Rp 5.277.064.650.987,30 dan pada tahun 2020 realisasi sebesar Rp 5.755.258.016.193,64 dan pada tahun 2021 sebesar Rp 5.508.767.906.132,69 dan pada tahun 2022 realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp 4.816.652.654.356,79, Namun jika dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 pasal 39

Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, kinerja penganggaran dikatakan sangat baik jika mempunyai persentase lebih dari 90%. Maka dapat disimpulkan anggaran pada Provinsi NTT belum dapat dimanfaatkan secara maksimal atau masih rendah. Tingkat serapan yang rendah pada anggaran belanja Provinsi NTT ini berasal dari belanja barang dan jasa yang menurun sebagai akibat banyaknya pengadaan barang dan jasa yang terhambat kendala administrasi sebagai dampak *refocusing* APBD (Kabar NTT, 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020, pemerintah daerah berperan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahannya dengan berlandaskan pada asas otonomi, dan berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan ini merupakan suatu pertanggungjawaban kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan kondisi di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019-2022.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah Bagaimana Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi NTT tahun anggaran 2019-2022 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2019-2022

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Provinsi NTT Sebagai dasar informasi bagi Pemerintah Provinsi dalam pengambilan kebijakan Kinerja Keuangan daerah di Pemerintah Provinsi NTT di masa yang akan datang.
- b. Bagi Universitas Katolik Widya Mandira diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas dan dapat menjadikan bahan referensi bagi mahasiswa lain.
- c. Bagi penulis, memberikan manfaat untuk mengimplementasikan ilmu terutama menyangkut Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kupang serta membandingkan antara teori dengan praktek lapangan.